

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian dengan topik ekosistem media di Indonesia masih jarang. Pada bagian ini, peneliti menjabarkan beberapa penelitian terdahulu melalui sumber nasional maupun internasional sebagai rujukan sekaligus batasan ruang lingkup penelitian ini. Berikut adalah enam penelitian terdahulu dari jurnal ilmiah yang dicari menggunakan kata kunci *mass media ecosystem* dan ekosistem media massa.

Pertama merupakan penelitian yang ditulis oleh Mufti Nurlatifah dengan judul “Posisi Undang-Undang Pers Indonesia dalam Ekosistem Media Digital” dari Profetik Jurnal Komunikasi tahun 2018. Pada penelitian tersebut, Nurlatifah memberi kesimpulan bahwa aktivitas jurnalisisme yang menggunakan media cetak, penyiaran, dan baru (daring) sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Walau pada praktiknya, aktivitas jurnalisisme media baru masih mengalami banyak perkara pers dalam aturan hukum yang belum diatur dan mampu menjerat pekerja pers atau jurnalis (Nurlatifah, 2018). Melalui metode penelitian kualitatif, Nurlatifah menarik kesimpulan menjadi dua poin, yaitu 1) Undang-Undang Pers menjadi satu-satunya undang-undang yang berbicara mengenai pers dan kebebasan berpendapat, termasuk yang terjadi di media daring dan 2) Undang-Undang Pers belum muncul sebagai rujukan aturan pidana maupun perdata atas berbagai kasus pers daring yang terjadi di Indonesia.

Penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2018 ini, menjadikan Undang-Undang Pers sebagai acuan untuk menganalisisnya menggunakan sudut pandang *lex specialis* dan *lex generalis* (Nurlatifah, 2018). Ekosistem media digital yang dijabarkan pada penelitian tersebut belum secara mendalam dianalisis menggunakan perspektif teori komunikasi. Selain itu, juga belum menjabarkan secara detail kerugian yang dialami oleh para jurnalis akibat praktik aktivitas media daring yang belum diatur dalam Undang-Undang Pers. Hasil tersebut membuat peneliti memerlukan artikel jurnal lain yang mampu menjabarkan secara lebih terperinci terkait dengan tantangan para jurnalis di tengah ekosistem media saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Joan Donovan dan Danah Boyd dengan judul “*Stop the Presses? Moving From Strategic Silence to Strategic Amplification in a Networked Media Ecosystem*” dari jurnal *American Behavioral Scientist* tahun 2019, menjadi penelitian kedua yang dijadikan rujukan untuk melengkapi informasi dari rujukan penelitian yang pertama, terkait ekosistem media massa dan kaitannya dengan para jurnalis. Pada penelitian tersebut, Donovan dan Boyd menggunakan metode studi kasus dengan teori *strategic silence* untuk menganalisis bagaimana media berita beralih ke distribusi daring dengan berbagai konsekuensinya. Terlebih ketika *gatekeeper* yang semula berada di tangan editor suatu perusahaan media, telah digantikan oleh kecanggihan algoritma yang diciptakan perusahaan mesin pencari dan media sosial—seperti Google, Youtube, Facebook, dan Twitter. Hal ini akhirnya menyebabkan evolusi dalam disinformasi (Donovan & Boyd, 2019).

Kenyataan tersebut membuat perusahaan media massa semakin bergantung pada algoritma dan hal itu sangat memengaruhi kerja pada jurnalis. Para jurnalis pada akhirnya dituntut agar mampu bersaing supaya mampu memecahkan berita, namun di sisi lain para jurnalis juga dituntut untuk menurunkan standar kualitas mereka. Keadaan tersebut menjadikan perusahaan media memiliki kualitas berita yang lebih rendah supaya mampu bersaing—umpan klik (*clickbait*) dan lebih memahami tentang bagaimana pembaca mengonsumsi berita dalam ekosistem yang dikuratori oleh algoritma (Ananny & Crawford, 2015 dalam dalam Donovan & Boyd, 2019).

Berbeda dengan penelitian pertama yang dijadikan rujukan, pada penelitian kedua ini Donovan dan Boyd juga telah mampu memperjelas bahwa model bisnis, praktik budaya, dan pembenaran retorik industri media dan teknologi juga akhirnya tetap bisa dieksploitasi oleh mereka yang ingin memanipulasi media dan merugikan. Perlu adanya amplifikasi strategis yang mengharuskan semua aktor yang terlibat dalam pra produksi, produksi, hingga distribusi suatu berita untuk berhati-hati, etis, dan tetap siap untuk bertanggung jawab secara penuh ketika dimintai pertanggungjawaban secara publik (Donovan & Boyd, 2019). Kekurangan pada penelitian ini, belum dijelaskan contoh amplifikasi strategis seperti apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan media untuk melibatkan semua aktor dalam proses pembuatan dan pendistribusian produk jurnalistik di media daring.

Peneliti membutuhkan perspektif lain dengan merujuk penelitian ketiga berjudul “*Climate Journalism in Changing Media Ecosystem: Assessing The*

*Production of Climate Change-Relate News Around The World*” tulisan Mike S. Schafer dan James Painter dari jurnal WILEY WIREs Climate Change. Pada penelitian yang dipublikasikan tahun 2020 ini, memperlihatkan kondisi kerja saat itu pada jurnalisme lingkungan—divisi khusus yang melakukan liputan tentang perubahan iklim. Menurut temuan Schafer dan Painter, terjadi perubahan dalam ekosistem media di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa. Sejumlah media di sana mengakui bahwa media massa telah mengalami krisis karena semakin sulit menjangkau khalayak luas yang berpengaruh pada perekonomian perusahaan. Akibatnya, banyak media mengurangi biaya operasional dengan memotong gaji staf dan jurnalis, mengurangi frekuensi publikasi, dan beralih ke publikasi daring. Selain itu, perkembangan teknologi dan menjamurnya media sosial juga telah mengganggu hierarki di ruang redaksi sebagai *gatekeeper* berita/informasi, lantaran banyak berita yang ditemui melalui perantara digital, seperti mesin pencari Google dan Meta tidak dikurasi secara jurnalistik, tetapi secara algoritma (Schafer & Painter, 2020).

Pemaparan di atas sama dengan temuan Donovan dan Byod pada penelitian rujukan kedua, yang membuat Schafer dan Painter juga melihat bahwa kenyataan tersebut membuat kekhawatiran tentang kontrol terhadap kualitas berita yang dikonsumsi oleh masyarakat luas, terutama terkait dengan pemberitaan seputar iklim. Walau begitu, pada penelitian tersebut tetap memiliki kekurangan di mana penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh Donovan dan Byod sudah terlalu lama. Hal ini juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa belum banyak penelitian yang membahas topik ekosistem media, padahal ekosistem media telah

berubah dengan cepat (Schafer & Painter, 2020). Pernyataan tersebut memperkuat alasan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan terutama untuk mengkaji ekosistem media massa di Indonesia, terutama Yogyakarta.

Selanjutnya, “*Negotiating Boundaries in Changing Media Ecosystem: The Case of Swedish Cultural Journalism*” yang merupakan penelitian keempat dengan pembahasan mengenai para jurnalis budaya di Swedia—cetak dan penyiaran dari jurnal *Journalism Studies* tahun 2021. Penelitian Kristina Riegert menyoroti adanya suatu perubahan signifikan akibat kemunculan teknologi digital. Perubahan tersebut menyebabkan melemahnya profesionalisme kerja yang terlanjur “dijajah” oleh perubahan teknologi yang seringkali digunakan sebagai kontrol ekonomi (Riegert, 2021).

Penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2021 tersebut menyoroti tiga hal utama untuk menjawab problematika jurnalisme budaya di tengah digitalisasi media. Tiga hal utama itu meliputi, 1) bagaimana para jurnalis budaya dapat mendefinisikan tugas atau fungsi dari jurnalisme budaya, dan batasannya terhadap rubrik—berita, opini, atau hiburan, 2) bagaimana identifikasi dan status jurnalisme budaya dalam berbagai macam institusi atau organisasi media, dan 3) bagaimana jenis organisasi media dapat memengaruhi pekerjaan jurnalis budaya dengan adanya budaya jurnalistik di dalam suatu organisasi media. Melalui ketiga poin utama tersebut, penelitian Riegert menyimpulkan bahwa digitalisasi memang telah mengubah ekosistem media (Riegert, 2021).

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Schafer dan Painter dengan menetapkan satu subjek penelitian, yaitu jurnalisme iklim, Riegert juga melakukan hal yang serupa pada penelitiannya, dengan menetapkan jurnalisme budaya sebagai pemeran utama dalam penelitiannya. Namun menurut peneliti, era digitalisasi secara merata memang menjadi tantangan bagi semua jenis jurnalisme—dalam surat kabar biasanya disebut dengan istilah rubrik, dari berbagai macam organisasi media. Penelitian ini akan memperkaya dengan melihat ekosistem media massa digital yang berpengaruh pada para jurnalis, terutama dalam isu fleksplorasi dari berbagai jenis jurnalisme/rubrik.

Selanjutnya, pada penelitian rujukan kelima merupakan penelitian yang dilakukan oleh Ethan Zuckerman tahun 2021 dengan judul “*Why Study Media Ecosystem?*” dari jurnal *Information, Communication & Society*. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif untuk dapat memahami karakteristik ekosistem media yang dapat membantu para partai politik, aktivis, dan lainnya yang bergantung pada media untuk menyebarkan pesan mereka (Zuckerman, 2021). Tak jauh berbeda dengan penelitian rujukan sebelumnya, Zuckerman juga menjabarkan Google dan Meta menjadi *distributed media* yang sangat sukses secara ekonomi, karena mampu menggabungkan ruang iklan dan data tentang perilaku pengguna di properti mereka sendiri. Selain itu, Google dan Meta juga telah berhasil mewakili 70 persen pasar iklan digital global (Market Watch, 2020 dalam Zuckerman, 2021).

Pada penelitiannya, Zuckerman memberikan solusi yang perlu dilakukan supaya dapat memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan pemahaman dari berbagai *distributed media* yang ada, seperti Google, Meta, dan Twitter. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menemukan cara untuk mengintegrasikan alat yang mampu menyelidiki pengalaman pengguna media sosial individu dengan lebih detail dari fitur *Audience Insight* yang sudah ditawarkan oleh *distributed media* raksasa bersangkutan. Hal ini supaya perusahaan media massa mampu mengaudit algoritma dari tiap-tiap *distributed media* secara terperinci.

Langkah selanjutnya, perlu disadari bahwa pentingnya melakukan peningkatan pemahaman dari lapangan, yakni data yang hanya berasal dari satu platform atau dari fitur *Audience Insight* yang disediakan oleh media sosial, memiliki keterbatasan. Lalu yang ketiga dan tidak kalah penting adalah perusahaan media dapat membangun suatu penemuan yang mampu mengidentifikasi secara linguistik untuk lebih memahami dinamika dan pola fundamental yang berulang dalam berbagai konteks (Zuckerman, 2021). Kekurangan dalam penelitian tersebut adalah solusi yang diberikan tergolong eksklusif, sehingga tidak bisa melibatkan masyarakat secara langsung untuk turut menjaga keseimbangan ekosistem media massa berbasis digital.

Kemudian penelitian keenam yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan rujukan adalah milik Julian McDougall dan Isabella Rega dengan judul "*Beyond Solutionism: Differently Motivating Media Literacy*" dari jurnal *Media and Communication*. Pada penelitian yang dilakukan tahun 2022 ini, mengangkat latar belakang peran literasi media dalam keseimbangan ekosistem media di

masyarakat. Solusi lain untuk menjaga keseimbangan ekosistem media massa berbasis digital yang ditawarkan oleh McDougall dan Rega adalah dengan melihat bahwa perubahan positif akan terjadi ketika literasi media berkembang secara kolektif. Skema tersebut dapat memengaruhi bagaimana masyarakat dalam mengakses berita/informasi, memiliki kesadaran terhadap hal yang diakses, memiliki kemampuan untuk memahami berita/informasi dengan baik, dan mengetahui konsekuensi yang akan didapat setelah mengonsumsi suatu berita/informasi tertentu (McDougall & Rega, 2022).

Pada penelitiannya, McDougall dan Rega mengungkapkan bahwa suatu media massa arus utama memerlukan “ruang ketiga” atau mitra, seperti institusi pendidikan—wadah untuk meningkatkan kesadaran akan sumber dan skeptisisme, organisasi, komunitas, maupun aktivisme sebagai perpanjangan tangan supaya dampak literasi media dapat diperoleh secara masif (McDougall & Rega, 2022). Berbeda dengan lima penelitian sebelumnya yang lebih menjabarkan tentang akibat dari adanya digitalisasi—perubahan teknologi, penelitian ini telah melampauinya hingga pada titik memberikan solusi yang bisa diusahakan secara kolektif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan melakukan pelatihan literasi media.

Melalui enam penelitian yang telah dijabarkan di atas, terdapat benang merah yang terletak pada temuan dengan kecenderungan serupa. Tulisan Donovan (2019), Schafer (2020), Riegert (2021), dan Zuckerman (2021) menemukan bahwa kenyataan media massa saat ini dikendalikan oleh algoritma sebagai *gatekeeper*, *clickbait* sebagai tujuan, dan kehadiran *distributed media*—yang



memaksa perubahan model bisnis, terutama pengelolaan iklan. Selain itu, Schafer (2020) juga menemukan bahwa langkah yang diambil oleh perusahaan media bermuara pada pemotongan gaji dan pengurangan jumlah staff. Penelitian Nurlatifah (2018) memperkuat keadaan tersebut dalam konteks Indonesia dengan menyoroti peran regulasi, lantaran kelemahan dari regulasi mengakibatkan para jurnalis menjadi rentan, terutama hak kebebasan berpendapat. Fokus pada penelitian yang dilakukan oleh McDougall dan Rega (2022) adalah solusi, di mana dibutuhkan aksi kolektif yang mengarah pada literasi masyarakat luas untuk turut membantu menyeimbangkan ekosistem media saat ini. Hal tersebut memperkuat alasan peneliti untuk melihat situasi dan upaya mitigasi yang dilakukan media massa berbasis digital di Yogyakarta, dalam menjaga keseimbangan ekosistem media terutama yang berkaitan dengan isu fleksibilitas terhadap para jurnalisnya.

## **2.2. Landasan Teori**

Berbagai isu ekosistem media massa yang tertulis dari latar belakang hingga tinjauan pustaka memiliki benang merah yang jelas, yaitu akibat revolusi teknologi—terutama setelah munculnya Google dan Meta, keberlangsungan ekonomi perusahaan media terancam dan berpengaruh pada praktik kerja para pekerja media, terutama jurnalis. Kenyataan tersebut tidak bisa dihindari, lantaran revolusi teknologi merupakan penyangga globalisasi. Apabila tidak ada kemajuan teknologi, maka perusahaan-perusahaan tidak bisa merentang luas di seluruh dunia (Priyono, 2021). Pada sisi lain, revolusi teknologi juga perlu diikuti oleh

adanya regulasi. Hal ini menjadi penting, karena dengan tidak adanya regulasi akan mengakibatkan kebuasan pengejaran laba (New York Review of Books, 2009 dalam Priyono, 2021). Pemahaman ini perlu dikaji pula melalui kacamata ekonomi politik komunikasi.

### **2.2.1 Ekonomi Politik Komunikasi**

Ekonomi politik adalah studi tentang hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan dalam berbagai bentuk produksi, distribusi, hingga konsumsi sumber daya—termasuk sumber daya komunikasi (Mosco, 2009). Ekonomi politik komunikasi dapat dipahami sebagai studi yang mengkritisi pentingnya keberadaan institusi—swasta dan pemerintah yang bertanggung jawab atas produksi, distribusi, dan pertukaran komunikasi sebagai komoditas dan wadah untuk melahirkan regulasi pada pasar komunikasi (Mosco, 2009). Sederhananya dalam sistem ekonomi politik, peran dari regulasi adalah mengarahkan “uang” supaya kembali ke tujuan awal dari adanya ekonomi, yaitu kesejahteraan bersama (Priyono, 2021).

Keberadaan teknologi yang semakin canggih bukan penyebab tunggal masalah yang terjadi saat ini, melainkan di tangan kekuasaan seperti apa keberadaan teknologi diarahkan. Perkara teknologi tidak sekadar terletak pada keterampilan teknis yang dimiliki oleh seseorang, namun juga perlu kepekaan terhadap praktik-praktik penggunaan teknologi sebagai kekuasaan yang memiliki konsekuensi sosial (Priyono, 2022). Salah satunya adalah yang terjadi di industri media massa saat ini, di mana lanskap yang berubah secara fundamental akibat

dominasi dari *distributed media* atau media terdistribusi (berbagai macam organisasi media sosial dan mesin pencari, seperti Google dan Meta).

Terjadinya revolusi teknologi dengan munculnya *distributed media*, menjadi pemegang kendali sesungguhnya atas segala macam arus informasi global yang selama ini dipegang oleh industri media massa (Sudibyo, 2022). Fakta tersebut membuat peran media massa yang didasari dengan hierarki yang jelas, linier, dan memiliki pusat kontrol serta aliran konten satu arah dari beberapa produsen ke khalayak luas telah berubah. Kondisi yang terjadi saat ini menjadi berjejaring, tidak linier, serta aliran konten yang multi arah dan timbal balik dari banyak produsen ke banyak konsumen (Wittel, 2015).

Selanjutnya, *distributed media* akhirnya dianggap memiliki kemampuan yang lebih unggul dibandingkan teknologi pada era media massa cetak dan penyiaran. *Distributed media* mampu memberikan harga yang lebih murah dan efisien dalam beberapa hal, seperti 1) mampu menampilkan teks, suara, gambar, dan video secara bersamaan, 2) mampu mengintegrasikan komunikasi dan informasi, 3) objek digital dapat direproduksi tanpa henti dengan biaya minimum, dan 4) tidak ada beban apapun yang memudahkan pendistribusian secara cepat. Selain itu, keberadaan teknologi juga dapat membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi produksi sosial dan organisasi sosial (Wittel, 2015).

Pada era *distributed media*, kepemilikan alat produksi yang masif tetap menjadi wacana bagi ekonomi politik media massa saat ini. Hal tersebut disebabkan karena kepemilikan alat produksi tidak hanya relevan dengan konten media, tetapi juga konektivitas. Kenyataan itu mampu memengaruhi ideologi

hingga manipulasi pesan, sehingga terdapat kontrol interaksi daring yang pada akhirnya bermuara pada sosialita dan subjektivitas tertentu, serta kekuatan algoritma dalam menyebarluaskan informasi (Wittel, 2015). Secara tidak langsung, hal tersebut akan mengantarkan khalayak untuk mengonsumsi informasi secara berlebihan tanpa validasi yang jelas, lantaran dominasi informasi yang tersebar telah dikendalikan oleh algoritma sebagai kurator dan editor (Sudiby, 2022).

Denis McQuail (dalam Wittel, 2015) memberikan tujuh klaim untuk melihat adanya praktik ekonomi politik komunikasi pada media massa, seperti 1) kontrol ekonomi yang menjadi penentu, 2) struktur media terpusat, 3) berkembangnya integrasi media secara global, 4) konten dan khalayak dikomodifikasi, 5) menurunnya keragaman konten, 6) oposisi dan suara alternatif terpinggirkan, serta 7) kepentingan publik berada di bawah kepentingan pribadi. Pada ekonomi politik komunikasi, terutama dalam praktiknya di industri media massa, perlu juga untuk melihat “realitas pasar” di masa teknologi digital. Aspek “realitas pasar” merupakan hal yang tidak jauh dari teori ekonomi politik Marx, di mana keberadaan tenaga kerja juga perlu dieksplorasi lebih rinci (Wittel, 2015).

Pentingnya mengeksplorasi keberadaan tenaga kerja disebabkan oleh jurnalisme pada media massa—terutama cetak, sedang mengalami kemunduran dan berjuang untuk menemukan model bisnis baru. Salah satu kumpulan esai tentang runtuhnya jurnalisme di Amerika Serikat berjudul “*Will the last reporter please return out the lights*” (McChesney & Pickard, 2011 dalam Wittel, 2015) memperlihatkan secara jelas bahwa terdapat indikasi parah yang terjadi pada para

jurnalis akibat perkembangan teknologi. Pada sisi lain, menurut Nielsen dan Ganter (Sudiby, 2022) banyak studi terkait yang kurang menyoroti bahwa media massa telah kehilangan kendali atas jurnalisme dan tidak lagi mampu menentukan nasibnya sendiri di bawah bayang-bayang perusahaan *distributed media*.

Padahal menurut teori Marxis, media massa dikategorikan sebagai kelas kontrol atau pedoman masyarakat supaya dapat mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Selain itu dengan adanya media massa, sebagai masyarakat juga diharap bisa menyesuaikan diri dalam suatu proses politik sebagai upaya untuk bertahan hidup. Pada masyarakat modern, media massa menjadi lembaga kunci yang dinilai mampu mempresentasikan diri sebagai ruang publik yang menentukan dinamika sosial, politik, dan budaya—lokal maupun global (Mosco, 2009). Itu artinya keberadaan tenaga kerja pada media massa menjadi hal yang tidak kalah signifikan.

Selanjutnya, kontrak kerja yang ditawarkan justru mengharuskan para kelas pekerja untuk memasuki hubungan kelas, di mana kerja mereka akan dieksploitasi dan menghasilkan surplus yang tidak mereka miliki. Pada kondisi ini, pekerja tidak bisa menolaknya karena pasar tenaga kerja adalah bentuk represi yang dilembagakan dan struktural, guna memaksa mereka untuk menjual tenaga kerja (Fuchs, 2020). Pierre Bourdieu berpendapat, bahwa pada akhirnya ketika berbicara tentang kelas, tidak sekadar berbicara tentang ekonomi, melainkan juga berbicara tentang hubungan politik dan budaya yang ditentukan oleh jumlah modal ekonomi (uang dan alat produksi), modal politik (pengaruh dalam

hubungan sosial), dan modal budaya (reputasi) yang dikendalikan oleh seorang individu (Fuchs, 2020).

Marx (dalam Magnis-Suseno, 1999) juga menegaskan bahwa segala macam hubungan, tatanan, sikap, perasaan, upacara, dan norma feodal merupakan dalih untuk melakukan eksploitasi terhadap kelas bawah. Selain itu nilai-nilai feodal pada dasarnya melupakan ideologis, di mana kenyataan bahwa masyarakat feodal merupakan masyarakat pengisapan manusia atas manusia. Sederhananya, kapitalisme diartikan sebagai sistem ekonomi yang mengakui hukum tawar-menawar dan bebas—dari batasan penguasa, produksi, dan pembatasan tenaga kerja, karena kapitalisme semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar sebagai nilai tertinggi (Magnis-Suseno, 1999).

Logika akumulasi kapitalisme menciptakan keadaan yang timpang dan tidak adil. Pada masyarakat heterogen, keterasingan merupakan kelompok dominan yang mampu mengendalikan produk kerja lantaran memiliki kekuatan untuk memaksa orang lain bekerja, mempunyai kepemilikan atas produk tenaga kerja, dan memaksakan ideologi politik pada pengambilan keputusan secara kolektif. Berbeda dengan para pekerja yang tidak memiliki kendali maupun kepemilikan (Fuchs, 2020).

Menurut Fuchs (2020) sebelum menganalisis kondisi pekerja, diperlukan tahap awal untuk membedakan berbagai kondisi kerja yang meliputi, 1) teknologi yang digunakan sekaligus pengaruhnya terhadap pekerja, 2) implikasi organisasi kerja terhadap kapasitas mental dan fisik—kesehatan pekerja, 3) aspek-aspek hubungan produksi—upah, kontrak, dan waktu kerja, 4) kualitas lingkungan kerja,

5) aspek pengendalian dan pengawasan ketenagakerjaan, 6) aspek organisasi politik—serikat, dan 7) bagaimana undang-undang negara membentuk kondisi kerja. Mengingat bahwa kondisi pada masyarakat kapitalis, elit memiliki peran untuk mengontrol kekuatan ekonomi, politik, dan budaya dengan berusaha mengatur waktu yang bisa diakumulasi ke dalam ekonomi kapitalis. Tidak mengherankan apabila pada akhirnya kaum kelas elit akan mengakumulasi lebih banyak modal yang mereka punya untuk dapat memproduksi dengan nilai yang lebih absolut, salah satunya dengan memperpanjang hari kerja. Tujuannya bukan supaya pekerja lebih santai dalam melakukan pekerjaannya, melainkan memproduksi komoditas yang lebih banyak dan tetap diatur dalam tenggat ketat (Fuchs, 2020).

Penjelasan di atas melahirkan logika akselerasi/percepatan budaya yang memanifestasikan budaya itu sendiri untuk memulai aktivitas baru, seperti munculnya hobi bekerja keras, makanan cepat saji, gaya hidup serba cepat, hingga menggunakan barang untuk dikonsumsi (seperti barang elektronik) yang memiliki masa pakai dalam durasi yang relatif singkat di mana konsumen akan merasa “dipaksa” memperbaharui barang milik mereka dan menggantinya dengan versi yang terbaru. Logika akselerasi dalam ekonomi kapitalis menggambarkan bahwa “uang adalah waktu” dan waktu dianggap sebagai suatu kekuatan dan kekuasaan, sehingga prinsipnya adalah hidup—waktu itu singkat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa waktu kerja yang teralienasi mampu memajukan eksploitasi dan kerentanan tenaga kerja (Fuchs, 2020).

Kapitalisme secara nyata telah berkontribusi pada berbagai eksploitasi dan kerentanan terhadap para tenaga kerja yang marak hingga saat ini. Sebagai tenaga kerja perlu menentukan tujuan, apakah 1) sekadar menetralkan dampak buruknya, atau 2) mengubah struktur. Setelah itu, perlu juga untuk menentukan target utama strategi yang ada di level 1) makro-politis atau 2) mikro-sosial (Wright, 2019). Berikut adalah empat logika strategis terhadap anti-kapitalisme yang bisa dijadikan pedoman oleh tenaga kerja.

Empat Logika Strategis Anti-Kapitalisme	Menetralkan Dampak Buruk	Mengubah Struktur
Makro-Politis	Menjinakkan kapitalisme	Menghancurkan kapitalisme
Mikro-Sosial	Melarikan diri dari kapitalisme	Mengikis kapitalisme

**Tabel 1. Matriks Logika Strategis Anti-Kapitalisme**

Sumber: Wright, 2019

Melalui empat logika strategis anti-kapitalisme di atas, dapat membantu tenaga kerja untuk melihat posisinya berada di mana dan dapat menentukan strategi mana yang paling *feasible* untuk dilakukan.

Selain dari kacamata kapitalisme, adanya revolusi teknologi terhadap ketimpangan ekosistem media massa juga dipengaruhi oleh praktik neoliberalisme—kajian ekonomi politik, di mana ekonomi pasar bebas hanya dilihat dari sisi positifnya saja. Neoliberalisme tidak sekadar membicarakan perihal ekonomi saja, melainkan tentang manusia dan masyarakat, melalui cara pikir ekonomi yang khas sebagai perangkat utamanya (Priyono, 2021). Sejak



tahun 1970, terjadi peralihan besar-besaran pada praktik-praktik dan pemikiran ekonomi politik di berbagai negara ke arah neoliberalisme (Harvey, 2009).

Neoliberalisme telah menjadi cara diskursus yang hegemonik. Hal tersebut membuat pikiran neoliberalisme menjadi pikiran kolektif dalam menginterpretasikan, menjalani hidup, dan memahami dunia. Neoliberalisme menjadikan aktivitas transaksi pasar menjadi etika yang bernilai sebagai pemandu bagi seluruh tindakan manusia, sekaligus mampu menjadi pengganti bagi semua kepercayaan etis yang dianut sebelumnya. Neoliberalisme melihat bahwa kebaikan sosial dapat dicapai apabila secara maksimal dengan memaksimalkan luasan dan frekuensi transaksi pasar guna membimbing pengambilan keputusan-keputusan dalam pasar global (Harvey, 2009).

Capaian utama dari neoliberalisme adalah redistribusi atas kekayaan maupun pendapatan. Harvey (2009) telah menganalisis mekanisme utama ‘akumulasi melalui penjarahan’—istilah dalam konteks kelanjutan dan perluasan praktik-praktik akumulasi Marx sebagai tahap awal pada masa lahirnya kapitalisme. Dua di antara lima praktik akumulasi lahirnya kapitalisme adalah komodifikasi dan penindasan hak-hak kehidupan—komodifikasi atas tenaga pekerja (buruh).

Selain itu dalam lingkungan neoliberalisme, pekerja (buruh) yang mudah dipecah—*disposable labour* menjadi model asli di mana kondisi pekerja yang buruk dan sikap despotik—penguasa tunggal yang sewenang-wenang di tempat kerja menjadi lazim. Dampak dari neoliberalisme menjadi hal yang kejam terutama bagi perempuan—sistem produksi rumah tangga, pasar, dan

struktur-struktur sosial. Jaminan perlindungan sosial hilang begitu saja, terutama di negara-negara kapitalis maju. Realitas tersebut melahirkan berbagai rancangan supaya kaum buruh yang rentan (terutama perempuan) dapat bertahan hidup secara sosial maupun efektif dalam dunia pasar tenaga kerja yang fleksibel (Harvey, 2009).

Fleksibel dapat dicirikan, melalui 1) kontrak jangka pendek, 2) ketidakpastian status kerja, 3) tidak adanya jaminan perlindungan sosial, 4) pekerjaan yang terlalu menguras tenaga, dan 5) hancurnya pranata kolektif. Konsep fleksibel secara jelas menunjukkan bahwa neoliberalisme berhasil mengubah posisi pekerja dalam tatanan sosial dengan memperlakukan pekerja sebagai komoditi. Hal tersebut disebabkan karena jaminan perlindungan sosial yang sebelumnya telah disediakan oleh pranata demokratis tidak ada lagi (Harvey 2009). Penjelasan teori di atas, bisa menggambarkan tentang ekosistem media massa digital dan juga isu fleksiploitasi pada jurnalis secara teoretis, sebagai bentuk dari praktik kapitalisme dan neoliberalisme kontemporer yang memerlukan penjelasan lebih rinci tentang ekosistem media dan fleksiploitasi pada kerangka konsep.

### **2.3. Kerangka Konsep**

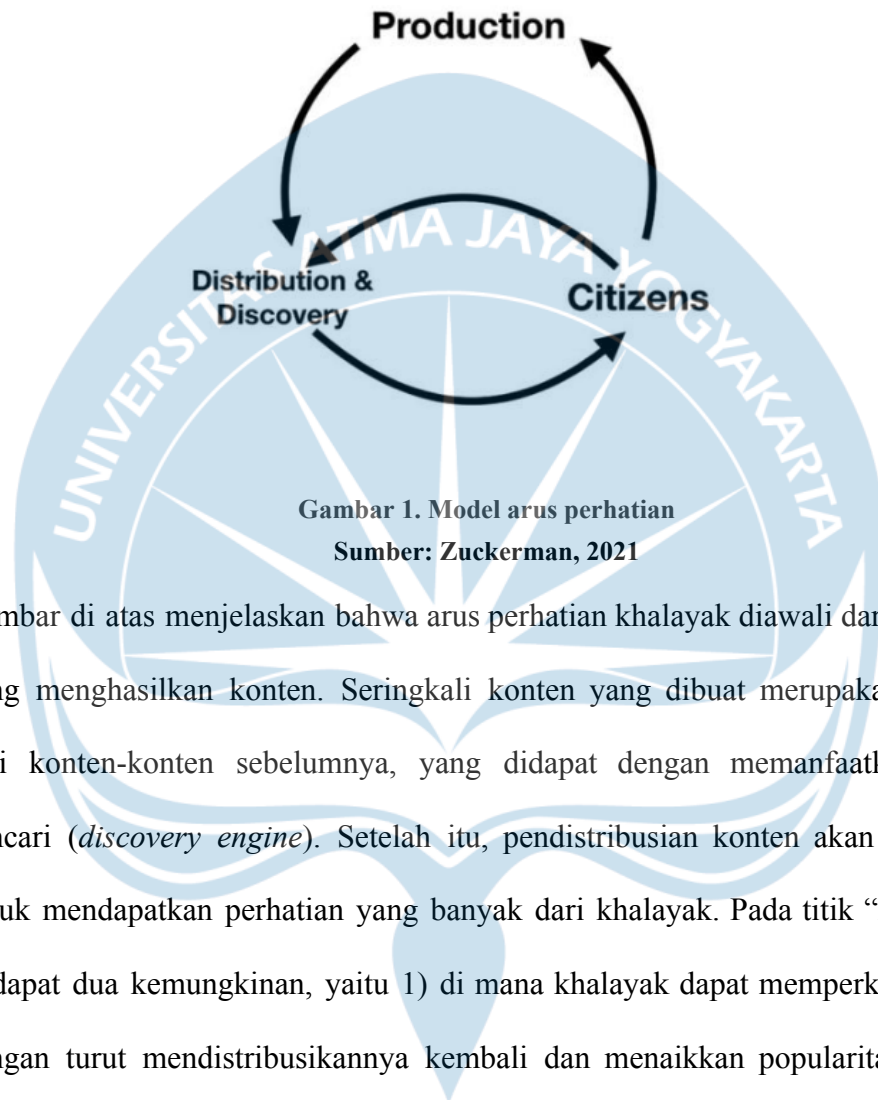
Konsep ekosistem media merupakan rangkaian hubungan dan aliran yang kompleks, namun dapat dianalisis secara kuantitatif (membaca algoritma) karena mampu menawarkan kacamata untuk memahami *distributed media* (Zuckerman, 2021). Ekosistem media sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena studi

tentang konsep ini sudah lahir sejak awal tahun 2000-an ketika munculnya blog di tengah media massa arus utama (Eickelman & Anderson dalam Zuckerman, 2021). Sepuluh tahun terakhir, ekosistem media baru menjadi daya tarik yang signifikan, lantaran meningkatnya kekuatan *distributed media* seperti Google, Meta, Youtube, dan Twitter, serta pengaruh media massa cetak dan penyiaran yang telah memudar (Zuckerman, 2021).

Pada ekosistem media, logika yang digunakan tidak jauh beda dengan ekosistem pada alam di mana sebuah ekologi yang dibentuk melalui hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya (Aeni, 2021). Begitu pula yang dimaksud dalam ekosistem media, di mana ekologi dibentuk melalui hubungan timbal balik antara perusahaan media dengan khalayak yang didasarkan oleh arus perhatian. Posisi arus perhatian di ekosistem media berada pada posisi yang cukup signifikan, karena mampu menjadi kekuatan ekonomi (Zuckerman, 2021).

Ketika ekosistem media pra digital, kekuatan untuk mengarahkan perhatian hanya sebatas pada *printer* dan penyiar. Entitas tersebut telah mampu menciptakan bisnis yang terintegrasi secara vertikal karena mampu menghasilkan berita, hiburan, dan iklan. Berbeda dengan saat ini, di mana hanya sistem komputerisasi yang bisa mempermudah dan mempercepat aliran informasi, menyebabkan kelangkaan perhatian informasi (Zuckerman, 2021).

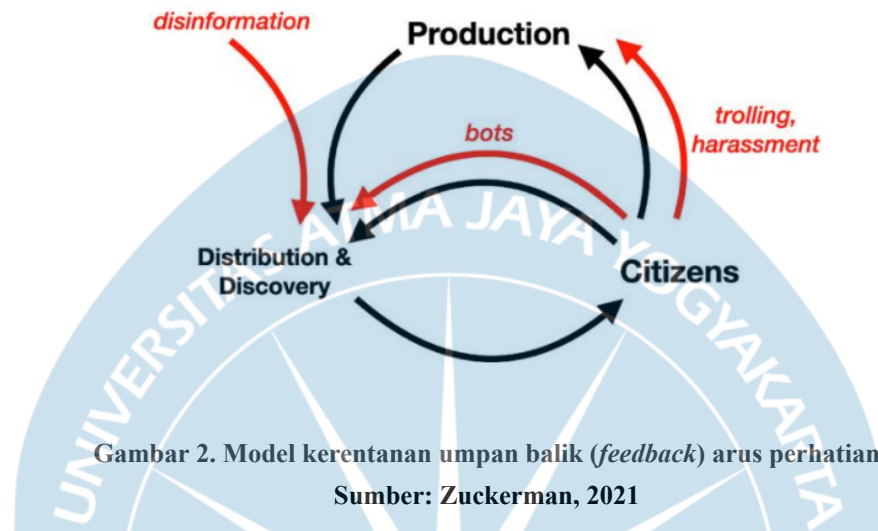
Berikut merupakan model untuk memahami aliran dalam ekosistem media yang terjadi pada masa revolusi teknologi saat ini.



Gambar 1. Model arus perhatian  
Sumber: Zuckerman, 2021

Gambar di atas menjelaskan bahwa arus perhatian khalayak diawali dari produsen yang menghasilkan konten. Seringkali konten yang dibuat merupakan saduran dari konten-konten sebelumnya, yang didapat dengan memanfaatkan mesin pencari (*discovery engine*). Setelah itu, pendistribusian konten akan dilakukan untuk mendapatkan perhatian yang banyak dari khalayak. Pada titik “khalayak”, terdapat dua kemungkinan, yaitu 1) di mana khalayak dapat memperkuat konten dengan turut mendistribusikannya kembali dan menaikkan popularitasnya atau justru meredamnya, serta 2) khalayak dapat menjadi sumber inspirasi untuk produsen membuat konten (Zuckerman, 2021).

Namun model arus perhatian juga menimbulkan kerentanan pada umpan balik, sebagai berikut.



Gambar 2. Model kerentanan umpan balik (*feedback*) arus perhatian  
Sumber: Zuckerman, 2021

Melalui gambar model di atas, terlihat bahwa adanya keberadaan bot pada masa kini mampu membajak siklus umpan balik antara khalayak dan mesin pencari hanya karena jumlah suka (*like*). Konten dengan perolehan jumlah suka yang banyak, akan mendominasi konten lainnya yang berarti lebih mudah tersebar secara masif kepada khalayak. Hal tersebut dapat memunculkan disinformasi yang tidak terkendali dan platform, dalam hal ini adalah *distributed media*, tidak memiliki tanggung jawab atasnya. Selain itu, keberadaan bot juga dapat menimbulkan permusuhan performatif (atau *trolling*) hingga pelecehan yang berkelanjutan dan berdampak pada khalayak dalam dunia nyata (*luring*) (Zuckerman, 2021).

Pada sisi lain, revolusi teknologi telah meyakinkan para *distributed media* bahwa keberadaan mereka merupakan praktik kapitalisme yang baik hati lantaran mampu membantu menyeimbangkan iklim demokrasi, kebebasan berekspresi, dan

kebebasan pers di seluruh dunia. Klaim tersebut didasari oleh kebaikan yang diimajinasikan mereka dalam membebaskan para perusahaan media (terutama jurnalis) dari tanggung jawab yang semestinya sebagai *gatekeeper* ruang publik secara digital sekaligus pengendali arus informasi daring (Sudibyo, 2022). Ekosistem media digital memang telah menggeser peran *gatekeeper* yang semula berada di ruang redaksi menjadi bertumpu pada algoritma yang secara tidak langsung tercipta karena “kesukaan” khalayak. Padahal khalayak sebagai institusi sosial memiliki pengaruh langsung terhadap konstruksi suatu berita (Tandoc, 2014). Kenyataan faktual tersebut telah menunjukkan kelahiran masalah baru yang mengancam demokrasi, keadaban publik, persaingan usaha yang sehat, hingga prinsip jurnalisme yang bermartabat (Sudibyo, 2022).

*Distributed media* telah menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu mendikte strategi perusahaan media massa saat ini, terutama dalam hal periklanan digital. Pengaruh dari posisi *distributed media* begitu besar, sehingga mereka pun dapat menentukan perusahaan media mana yang akan berhasil atau tidak dalam menciptakan ekosistem baru yang dikendalikan oleh mereka (Sudibyo, 2022). Terjadinya revolusi teknologi membuktikan bahwa teknologi tidak sekadar memengaruhi, namun lebih dari itu yaitu mentransformasi bentuk-bentuk kerja yang berdampak pada ekstensifikasi kerja (Izzati dkk., 2021). Dampak tersebut merupakan salah satu dari terapan fleksplorasi pada para pekerja terutama jurnalis, maka konsep fleksplorasi akan dijelaskan lebih rinci, sebagai berikut.

Fleksplorasi (*flexploitation*) pertama kali diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu pada tahun 1997, merupakan gabungan dari kata fleksibilitas dan

eksploitasi sebagai penggambaran budaya kerja yang buruk dan rentan (Shorthose & Strange, 2004, dalam Izzati dkk., 2021). Istilah tersebut muncul akibatnya fenomena meningkatnya skema kerja yang “sebentar-sebentar, tidak diatur, dan informal” (Shorthose & Strange, 2004, dalam Izzati dkk., 2021). Praktik fleksibilitas dicirikan melalui kerja-kerja temporer yang semakin masif yang dipenuhi oleh ketidakpastian, sehingga berdampak pada kondisi kerja yang rentan (Kong, 2014, dalam Izzati dkk., 2021).

Era *platform capitalism* seperti saat ini, fleksibilitas pada tenaga kerja terlanjur diwarnai oleh “citra positif” di mana para pekerja dibebaskan dari kakunya karier permanen dan diberi kesempatan untuk menjual segala barang dan jasa. Pada sisi lain, citra tersebut justru memperlihatkan secara nyata bahwa fleksibilitas pada tenaga kerja mampu merentenkankan para pekerja (Izzati dkk., 2021). Kerentanan para pekerja tidak sekadar mencakup aspek ekonomi semata, namun juga kesehatan—termasuk kesehatan mental, dan keselamatan pekerja (Izzati, 2020, dalam Izzati dkk., 2021).

Berikut ini merupakan beberapa kerentanan yang dihasilkan oleh praktik fleksibilitas, seperti ketiadaan jaminan, perlindungan sosial, *job security*, hingga tenggat yang ketat dan membuat jam kerja lebih panjang—termasuk bekerja di malam hari dan akhir pekan (Eikhof & Warhurst, 2013, dalam Izzati dkk., 2021). Selain itu, munculnya perasaan resah, cemas, dan merasa terisolasi pada pekerja juga merupakan kondisi mental yang diakibatkan oleh budaya kerja di bawah fleksibilitas (Kong, 2014, dalam Izzati dkk., 2021). Melalui pemaparan kerangka konsep di atas, penelitian ini menggunakan metodologi yang dijelaskan dengan

rinci, sebagai pedoman untuk menganalisis fenomena tentang ekosistem media massa dan praktik fleksplorasi saat ini.

